

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP TAHUN 2017)**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU
2018**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmat yang begitu melimpah serta tiada henti-hentinya terutama limpahan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan “ Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan maksud sebagai upaya menggambarkan hasil akhir dari kegiatan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun kedua dari Rencana Strategi 5 tahunan (2014–2019), sekaligus sebagai pertanggung-jawaban atas Perjanjian Kinerja yang disusun pada awal tahun.

Dalam LKjIP ini diyakini masih banyak memiliki kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu besar harapan kami kepada semua pembaca kiranya dapat memberikan masukan, kritikan maupun saran yang bersifat membangun, sehingga LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun mendatang akan lebih baik dan sempurna.

Pekanbaru, 23 Januari 2018

KEPALA DINAS

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU


drh. ASKARDIYA R. PATRIANOV, MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19591117 198303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai. Dari 4 indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017, menunjukkan bahwa 2 indikator yang dikategorikan sangat tinggi atau 50 % dan 50 % termasuk dalam kategori tinggi. Capaian tertinggi dicapai oleh indikator menurunkan angka kematian ternak yang mencapai 185,55% dan terendah adalah Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran yaitu 85,71%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. ke depan. Tantangan tersebut antara lain :

- 1) Usaha untuk meningkatkan populasi ternak masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan inseminasi buatan secara intensif belum berjalan. Usaha untuk pengembangan usaha perbibitan masih terkendala manajemen kelompok yang belum baik dan pengendalian keluar masuk ternak yang tidak terkendali.
- 2) Usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk masih berjalan secara maksimal sehingga berdasarkan NTP, manfaat kegiatan budidaya peternakan belum

memberikan porsi yang besar bagi pendapatan peternak. Hal ini selain disebabkan karena produktifitas peternak yang rendah, juga dipengaruhi oleh factor eksternal peternak seperti fluktuasi harga, harga sarana produksi pertanian dan mekanisme pemasaran.

- 3) Sebagian besar kondisi RPH/TPH/TPU serta sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar/syarat sebagai tempat penyelenggara pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang ASUH (halal, aman, sehat dan utuh), hal ini berkaitan dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, serta kurangnya perhatian dan komitmen dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Fungsi dan Tugas	2
D. Keadaan Pegawai	3
E. Keadaan Sarana dan Prasarana	5
F. Keuangan	6
G. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi.....	6
H. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)	6
I. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A . Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	11
C. Instrumen Pendukung	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja 2017.....	13
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya	15
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra....	16
D. Realisasi Anggaran	19
BAB IV. PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (orang)	3
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (orang)	3
Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (orang).....	4
Tabel 4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (orang)	4
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (orang)	4
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019	9
Tabel 7. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	10
Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	11
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017	11
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja	13
Tabel 11. Kategori Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017	14
Tabel 12. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014 s/d 2017	15
Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun IV	16
Tabel 14. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017	19
Tabel 15. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017	20

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- Lampiran 3. Laporan Pelaksanaan Program/Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 ...

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap pelaksana pemerintah untuk menyampaikan pelaksanaan kinerja dalam bentuk laporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan instansi pemerintah selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2017. Selain itu LKjIP tahun 2017 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti Lampiran 1. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program; Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Produksi Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Perbibitan Ternak; Seksi Pakan Ternak; serta Seksi Budidaya Ternak.
3. Bidang Agribisnis Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Pengembangan Kawasan; Seksi SDM dan Kelembagaan; serta Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
4. Bidang Kesehatan Hewan, yang terdiri atas : Seksi Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; serta Seksi Kalembeagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri atas : Seksi Hygiene Sanitasi; Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
6. UPT Inseminasi Buatan Daerah, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran; serta Seksi Pemeliharaan Ternak Unggul.
7. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Klinik Hewan; serta Seksi Laboratorium Veteriner.
8. UPT Plaza Ternak, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pelayanan Usaha dan Retribusi Ternak; serta Seksi Analisa Usaha, Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran.
9. UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pengembangan Ternak; serta Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.
10. Kelompok Pejabat Fungsional.

C. Fungsi dan Tugas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pengendalian bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran peternakan.
4. Pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.
7. Penyelenggaraan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan lintas kabupaten/kota.
8. Pemberdayaan sumber daya pertanian dan mitra kerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 225 orang. Data kondisi pegawai disajikan pada Tabel 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (Orang)

NO	URAIAN	ASN	THL	Jumlah
1	Laki-laki	48	105	153
2	Perempuan	48	55	103
Total		96	160	256

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (Orang)

No	Pendidikan	ASN	THL	Jumlah
1	S2	32	2	34
2	S1	30	53	83
3	D III	10	11	21
4	D II	3	1	4
5	D I	0	0	0
6	SLTA	20	68	88
7	SLTP	0	14	14
8	SD	1	11	13
Total		96	160	256

Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (Orang)

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	28
2	Golongan III	57
3	Golongan II	11
4	Golongan I	0
Total		96

Tabel 4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (Orang)

No	Bidang/UPT	ASN	THL	Jumlah
1	Sekretariat (termasuk kepala dinas dan sekretaris)	25	34	59
2	Bidang Produksi Peternakan	12	12	24
3	Bidang Agribisnis Peternakan	10	7	17
4	Bidang Kesehatan Hewan	7	6	13
5	Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	8	2	10
6	UPT Inseminasi Buatan Daerah	7	23	30
7	UPT Plaza Ternak	6	13	19
8	UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	9	16	25
9	UPT Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak	12	47	59
Total		96	160	256

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 (Orang)

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Fungsional Arsiparis	1
2	Fungsional Perencana	2
3	Fungsional Medik	5
4	Fungsional Paramedik	3
5	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	2
6	Fungsional Pengawas Mutu Bibit	1
Jumlah		13

E. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki aset mulai dari tanah, gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran dan lain-lain tersebar di bidang dan UPT. Fasilitas yang tersedia pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Ruang Rapat:
 - a. Ruang Rapat Besar : 1 Unit
 - b. Ruang Rapat kecil : 2 Unit

2. Tempat Upacara dan Apel Pagi dengan ukuran luas 300 m² (30 m x 10 m)

3. Tempat Parkir Kendaraan Bermotor:
 - a. Gedung Kantor : 1 Unit, dengan luas : 400 m²
 - b. Gedung Plaza Ternak : 2 Unit, dengan luas : 500 m²

4. Kamar Kecil/Toilet:
 - a. Gedung Dinas : 6 Unit
 - b. Gedung Plaza Ternak : 4 Unit
 - c. Gedung UPT IBD : 2 unit
 - d. Gedung UPT LVKH : 1 unit
 - e. Gedung UPT PTPPT : 2 unit

5. Halaman Kantor:
 - a. Gedung Dinas : 300 m²
 - b. Gedung Plaza Ternak : 400 m²
 - c. Gedung UPT IBD : 200 m²

6. Daya Listrik:
 - a. Gedung kantor : 80 A (53.000 VA)
 - b. Gedung UPT LVKH : 1) 100 A (66.000 VA)
2) 80 A (53.000 VA)
 - c. Gedung UPT Plaza Ternak : 50 A (33.000 VA)
 - d. Gedung UPT IBD : 60 A (41.500 VA)

7. Jaringan Telepon Kabel :
 - a. Gedung Kantor : 2 Unit (no tlp: 0761 - 43441 dan 43442)
 - b. Gedung UPT Plaza Ternak : 1 Unit (no tlp: 0761 – 24170)

8. Jaringan/Layanan Internet :
 - a. Gedung Kantor : 2 Unit
 - b. Gedung UPT Plaza Ternak : 1 Unit

9. Kendaraan Dinas
 - a. Mobil Jabatan : 9 unit
 - b. Mobil Operasional : 11 unit
 - c. Roda 2 : 27 unit
 - d. Roda 3 : 3 unit

F. Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperoleh anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Riau. Melalui APBD Provinsi Riau dialokasikan berupa belanja langsung sebesar Rp 72.713.100.731,-. Pada APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp. 51.098.628.129,-

Anggaran Pembangunan dari APBN yang tersedia mendukung program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dan pada TA. 2017 terdapat satu Satker berupa Tugas Pembantuan. Jumlah anggaran dikelola sebesar Rp 13.185.877.000,-

G. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis yang berupa :

1. Dari segi sumber daya manusia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 96 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 160 orang pegawai tidak tetap dan tenaga harian. Besarnya SDM yang ada belum didukung dengan kompetensi yang memadai sehingga roda organisasi belum dapat berjalan secara optimal.
2. Ketersediaan infrastruktur peternakan yang masih terbatas khususnya puskesmas dan pelayanan Inseminasi Buatan. Keterbatasan infrasturktur ini menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal.
3. Pemanfaatan Sumber Daya lahan belum optimal. Pemanfaatan lahan sebagai penyedia pakan ternak masih sangat besar. Peluang pengembangan sapi dan kerbau masih cukup tinggi sebesar 82,14% atau 913.559 ekor.

H. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

I. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun

2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2014-2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2016 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran organisasi, aspek strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, serta struktur organisasi;
- Bab II** Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 meliputi RPJMD Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
- Bab III** Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.
- Bab IV** Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014-2019 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta memuat strategi, arah kebijakan, program disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diringkas dalam poin-poin berikut:

1. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian)
2. Kemampuan permodalan petani dan peternak terbatas
3. Penerapan teknologi terbatas
4. Daya saing produk masih rendah
5. Lemahnya penanganan pasca panen dan pemasaran hasil peternakan.
6. Pemotongan ternak ruminansia betina produktif
7. Penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMS)
8. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan melalui 3 B (Bergizi, Beragam, Berimbang) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
9. Keterbatasan modal peternak dalam usaha peternakan.
10. Adanya ancaman penyakit hewan menular (AI/flu burung, Rabies, SE).

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, maka telah ditetapkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, sebagai berikut :

“ Terwujudnya Peternakan Riau yang Maju, Berdaya Saing tinggi dan Berkelanjutan Menuju Peternakan yang Sejahtera “

Pengertian dari kata kunci pada Visi diatas adalah :

1. **Maju** : Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan pembangunan yang baik dan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. **Berdaya Saing Tinggi** : Suatu kondisi Pemerintahan dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis

3. **Berkelanjutan** : mampu eksis dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan stategis dengan menggunakan sumber daya yang terbarukan.
4. **Sejahtera** : Terciptanya kondisi insan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, maka disusun Misi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil Peternakan
2. Menumbuhkan agribisnis Peternakan yang maju dengan dukungan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan.

Penjelasan misi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 dimaksudkan dengan ketersediaan sumber daya peternakan dan sarana pendukung mampu meningkatkan produksi dan produktifitas dalam mendorong usaha Peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
2. Misi 2 dimaksudkan melalui peningkatan produksi dan mutu hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan secara efisien dan efektif yang berwawasan agribisnis diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup dan sekaligus mendukung ketahanan pangan baik regional maupun nasional. Serta mampu menghasilkan keluaran berkualitas unggul secara kompetitif dan komparatif.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, maka telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019

No	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan	
	1.1. Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan	- Meningkatnya produksi daging ruminansia
	1.2. Meningkatkan status kesehatan hewan dan jaminan pangan asal hewan yang ASUH	- Menurunnya ancaman penyakit hewan strategis. - Meningkatnya prinsip hygiene sanitasi dalam proses penyediaan pangan asal hewan yang ASUH
2	Misi 2. Menumbuhkan agribisnis peternakan yang maju dengan dukungan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan	
	2.1. Meningkatkan skala usaha budidaya peternakan	- Meningkatnya pemilikan ternak tingkat rumah tangga

4. Strategi

Dari beberapa kombinasi strategi yang dihasilkan diatas, dilakukan pemilihan atau seleksi, sehingga diperoleh strategi yang sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai, sehingga strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan
- b. Memberikan insentif peningkatan produktivitas dan penerapan teknologi peternakan
- c. Pengembangan sistem integrasi tanaman dan ternak
- d. Pemberdayaan dan pendampingan peternak
- e. Pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan
- f. Meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan peternakan
- g. Peningkatan mutu hasil Peternakan melalui pemanfaatan teknologi
- h. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM peternakan
- i. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Tupoksi antar bidang, UPTD dan pengembangan unit kerja/ UPT serta stakeholder terkait
- j. Pemanfaatan lembaga keuangan makro dan mikro untuk pengembangan usaha agribisnis pertanian dan peternakan

5. Program

Rencana program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif revisi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2014-2019) disusun berdasarkan evaluasi tahun 2014-2016 serta rencana tahun 2017-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program dari SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 7. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Angka pendapatan peternak (Rupiah)
02	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	- Menurunkan Angka Kematian Ternak (%) - Persentase Penurunan Tingkat Cemaran (%)
03	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatkan Angka Kelahiran Ternak (%)

04	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan yang Mendapatkan Akses Pemasaran (kelompok)
----	---	--

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran Strategis dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2015-2019 yang menitik beratkan pada empat sasaran strategis seperti dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Tersedianya hasil peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah	- Populasi Ternak Sapi (ekor)
2	Meningkatnya peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis peternakan	- Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok)
3	Berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau	- Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan
4	Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Menurunkan angka kematian ternak (%)

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 maka dibuatlah Perjanjian Kinerja tahunan dengan dokumen resmi dapat dilihat pada Lampiran 2. Rincian Sasaran Strategis, Program serta anggaran perjanjian kinerja diurai pada Tabel 9.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya hasil peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah	- Populasi Ternak Sapi (ekor)	262.395,00
2	Meningkatnya peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis peternakan	- Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok)	35,00
3	Berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau	- Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	102,33
4	Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Menurunkan angka kematian ternak (%)	4,00

Beberapa pengertian indikator yang perlu diperjelas adalah :

1. Populasi Ternak Sapi adalah jumlah populasi ternak akhir tahun yang telah divalidasi.

2. Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran merupakan kelompok peternakan yang memperoleh pendampingan dan peningkatan usaha sehingga dapat menjual produknya.
3. Nilai NTP merupakan NTP rata-rata setahun
4. Angka kematian ternak adalah angka kematian ternak yang diperoleh dari analisis aplikasi ISIKHNAS (Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

C. Instrumen Pendukung

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, untuk mewujudkannya diperlukan sebuah perangkat teknologi untuk mengantarkan informasi tersebut, yaitu teknologi informasi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewadahi perkembangan informasi tersebut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengelola satu buah website, yaitu : <http://www.disnak.riau.go.id>

Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang E-Government, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar.

Hadirnya website ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat petani dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan pertanian. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan ide, masukan atau aduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pertanian di Riau. Disamping itu, kehadiran web ini adalah untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggungjawab, responsive, efektif, dan efisien dalam mendukung terwujudnya Riau Go IT.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja 2017

Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Berdasarkan Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2016 dengan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Kategori Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KATEGORI PENILAIAN
1	Tersedianya hasil peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah	Populasi Ternak Sapi (ekor)	262.395	236.497	90,13	Tinggi
2	Meningkatnya peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis peternakan	Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok)	35	30	85,71	Tinggi
3	Berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	102,33	97,90	95,67	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Menurunkan angka kematian ternak (%)	4,00	0,58	185,55	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 11, dari 4 indikator yang diukur terdapat 2 indikator yang dikategorikan sangat tinggi atau 50% dan 50% yang masuk dalam kategori tinggi. Capaian tertinggi dicapai oleh indikator penurunan angka kematian ternak yang mencapai 185,55% dan terendah adalah Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran yaitu 85,71%.

Dari realisasi perjanjian kinerja diatas maka dapat dijelaskan untuk setiap sasaran sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1. Tersedianya hasil peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah. Indikator yang digunakan adalah Populasi Ternak Sapi. Penetapan populasi ternak sapi karena ternak sapi merupakan komoditas yang relatif banyak disoroti dan mampu mempengaruhi ekonomi dan inflasi. populasi ternak sapi pada tahun 2017 dengan target 262.395 ekor, capaian 236.497 (90,13%). Angka ini masih dapat berubah karena data yang ada merupakan data sementara. Selanjutnya akan dilakukan validasi dengan petugas di daerah pada bulan Maret 2018.
- 2) Sasaran 2. Meningkatkan peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis pertanian dan peternakan. Keterlibatan swasta adalah dukungan keuangan dan pembinaan kelembagaan usaha. Peran ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kelompok usaha peternakan yang dapat memasarkan produknya. Dengan indikator Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran maka pada tahun 2017 pengembangan usaha peternakan yang mendapat akses pemasaran dengan target 35 kelompok, terealisasi sebanyak 30 kelompok atau realisasi 85,71 %.

3) Sasaran 3. Berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Ukuran berkurangnya kemiskinan dapat dilihat dari NTP. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan dinyatakan dalam persentase. Tujuan mengetahui indikator NTP untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, dengan mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP dapat diartikan kemampuan daya beli atau daya tukar (*term of trade*) petani relatif lebih baik dan tingkat kehidupan petani juga lebih baik.

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan dengan target 102,33 sementara capaian yang diraih 97,90 atau sekitar 95,67 %. Untuk dapat meningkatkan nilai NTP ini maka perlu dukungan lebih kuat kepada peternak untuk lebih meningkatkan produktifitas dan produksi sehingga nilai yang diperoleh petani lebih besar dan berusaha menekan harga sarana produksi dengan menyediakannya ketika dibutuhkan.

4) Sasaran 4. Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Indikator kinerja sasaran ini adalah penurunan angka kematian ternak. Pada tahun 2017 target kematian ternak adalah 4 %. Data capaian angka kematian ternak disajikan pada Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) dengan capaian 0,58 % atau capaian target sebesar 185,55 %. Untuk angka kematian ternak ini, maka semakin kecil anggarannya maka keberhasilannya semakin tinggi.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi tahun 2017 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dan kecepatan pertumbuhannya. Jika dibandingkan dengan tahunnya sebelumnya maka ditampilkan perkembangan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014 hingga 2016 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014 s/d 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017
1	Tersedianya hasil peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah	Populasi Ternak Sapi (ekor)	217.652	229.634	231.860	236.497
2	Meningkatnya peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis peternakan	Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok)	-	-	7	30

3	Berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	101,56	100,76	100,47	97,90
4	Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Menurunkan angka kematian ternak (%)	-	1,03	0,88	0,58

Memperhatikan Tabel 12, terdapat perkembangan indikator yang membaik, tetapi ada juga pertumbuhannya yang menurun. Untuk populasi ternak, terjadi peningkatan setiap tahun. Hal yang sama juga terjadi pada angka kematian ternak. Kondisi berbeda terjadi pada NTP sub sektor peternakan yang terus mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aktifitas pengembangan ternak belum mampu memberikan nilai tambah bagi usaha peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Untuk itu perlu ada upaya peningkatan nilai tambah atau nilai manfaat ternak yang dipelihara oleh peternak. Rincian Realisasi anggaran perkegiatan dapat dilihat pada Lampiran 3.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra

Selanjutnya dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2017 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga 2017 terhadap Target Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN HINGGA 2017	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN 2019	CAPAIAN TERHADAP 2019
1	Tersedianya hasil peternakan yang beragam, berkualitas dan memiliki nilai tambah	Populasi Ternak Sapi (ekor)	236.497	273.306	86,53
2	Meningkatnya peran serta swasta/ lembaga keuangan dalam kegiatan agribisnis peternakan	Jumlah kelompok peternakan yang mendapatkan akses pemasaran (Kelompok)	37	140,00	26,43
3	Berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	97,90	102,56	95,46
4	Meningkatnya ketersediaan dan jaminan pangan masyarakat yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Menurunkan angka kematian ternak (%)	0,58	1,20	315,21

Data pada Tabel 13 menyajikan capaian indikator kinerja tahun 2017 dengan target akhir kinerja rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan berakhir pada tahun 2018 dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tingkat populasi ternak sapi 236.497 ekor pada tahun 2017 sementara target akhir 2018 sebesar 273.306 ekor, jadi sampai 2017 realisasi target sebesar 86,53 %, sehingga masih diperlukan pemasukan ternak dari luar provinsi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya untuk mencapai peningkatan populasi pada akhir renstra menjadi

berat karena tidak tercapainya target tahunan. Hal ini akan berimbas pada peningkatan produksi ternak lokal.

- 2) Pencapaian kelompok untuk memperoleh akses pemasaran masih belum menggemblirakan. Hal ini terjadi karena pencapaian target yang rendah pada tahun 2017. Untuk kelompok peternakan tercapai 26,43 %.
- 3) Nilai Tukar Petani (NTP) peternakan tahun 2017 sebesar 97,90 atau 95,46 % dari target 2019 sebesar 102,56.
- 4) Target penurunan kematian ternak pada tahun 2018 adalah 1,20% maka capaian pada tahun 2017 telah menunjukkan hasil yang baik. Permasalahannya capaian kematian ternak yang dihasilkan pada ISIKHNAS perlu dibandingkan dengan jumlah kematian ternak yang tidak mampu dideteksi melalui ISIKHNAS.

1. Analisis Peningkatan/Penurunan kinerja dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan program dilakukan dengan berbagai kegiatan. Tidak tercapainya target sasaran kinerja disebabkan beberapa hal yaitu :

- 1) Pada tahun 2017 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menganggarkan belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 21.356.752.000,- yang terdapat pada 7 kegiatan. Dari 7 kegiatan tersebut terdapat 2 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu pengadaan ternak sapi dengan total ternak sebanyak 974 ekor. Pengadaan ternak ini tidak terealisasi karena pihak ketiga/rekanan yang ditunjuk tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Jumlah pengadaan sapi yang terealisasi sebanyak 384 ekor. Untuk menghindari agar tidak menjadi permasalahan dimasa yang akan datang, maka seluruh kegiatan hibah akan dilaksanakan pada awal tahun.
- 2) Usaha untuk meningkatkan populasi ternak masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan inseminasi buatan secara intensif belum berjalan. Usaha untuk pengembangan usaha perbibitan masih terkendala manajemen kelompok yang belum baik dan pengendalian keluar masuk ternak yang tidak terkendali.
- 3) Usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk masih belum berjalan secara maksimal sehingga berdasarkan NTP, manfaat kegiatan budidaya peternakan belum memberikan porsi yang besar bagi pendapatan peternak. Hal ini selain disebabkan karena produktifitas peternak yang rendah, juga dipengaruhi oleh factor eksternal peternak seperti fluktuasi harga, harga sarana produksi pertanian dan mekanisme pemasaran.
- 4) Sebagian besar kondisi RPH/TPH/TPU serta sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar/syarat sebagai tempat penyelenggara pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang ASUH (halal, aman, sehat dan utuh), hal ini berkaitan dengan

terbatasnya anggaran yang tersedia, sedangkan kewenangan operasional dan penerima manfaat ada pada Kabupaten/Kota.

b. Solusi

Berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya penyelesaiannya yaitu :

- 1) Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan IB serta melengkapi sarana dan prasarana inseminasi
- 2) Melengkapi sarana prasarana dan personil seperti petugas medis, paramedis, ATR, petugas pemeriksa kebuntingan, inseminator dan vaksinator dan tenaga administrasi, baik dari segi kuantitas dan kualitas, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi serta peranan puskesmas sesuai dengan Permentan No. 64 tahun 2007 oleh masing-masing kabupaten/kota sehingga pada kegiatan pelayanan kesehatan hewan melalui puskesmas terpadu dapat terlaksana secara optimal. Peningkatan kualitas petugas yang berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar atau pertemuan teknis baik yang dilakukan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Sebagai antisipasi munculnya penyakit sewaktu-waktu, maka dilakukan pengamatan ke lokasi-lokasi yang pernah terjadi kasus penyakit atau daerah rawan secara terprogram. Selain itu diupayakan pengoptimalan petugas PDSR dilapangan agar menginformasikan selain penyakit AI, juga menginformasikan penyakit hewan menular lainnya seperti rabies, SE serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung oleh ternak melalui sistem SMS gateway, sehingga informasi dapat diketahui dengan cepat.
- 4) Mendorong pengembangan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik untuk penyediaan pupuk tanaman perkebunan. Hal ini dapat dilakukan dengan memodifikasi kandang sehingga memudahkan dalam pengumpulan kotoran/feces dan urine. Selanjutnya dikembangkan teknologi pengolahan limbah sehingga bermutu tinggi.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengembangan ternak khususnya ternak sapi, pada lima tahun terakhir selalu menunjukkan perkembangan yang positif. Hanya saja pertumbuhan populasi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produksi ternak lokal yang signifikan. Hingga saat ini, produksi daging Provinsi Riau masih didominasi dari pemotongan ternak yang berasal dari luar Riau. Tidak terealisasinya belanja hibah, yang merupakan bentuk bantuan kepada masyarakat, menyebabkan pemanfaatan anggaran tidak maksimal. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu pemicu berkurangnya aktifitas riil peternakan.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Peningkatan populasi ternak khususnya sapi dan kerbau dapat dilakukan dengan intensifikasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Selain itu, pencegahan pemotongan ternak betina produktif juga dapat dijadikan salah satu kegiatan yang mampu meningkatkan populasi ternak lokal.

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyakit hewan telah dilakukan dengan menekan angka kematian dan mempertahankan agar wilayah Provinsi Riau tersebut tetap bebas penyakit hewan keluron menular (Brucellosis) pada sapi dan kerbau. Upaya mempertahankan status bebas Brucellosis dilaksanakan dengan memperlakukan pengetatan persyaratan terhadap pemasukan ternak ke Provinsi Riau dan pemeriksaan retest RBT terhadap seluruh ternak baik untuk bibit maupun untuk budidaya ternak potong (sapi, kerbau, kambing dan domba) yang masuk ke Provinsi Riau. Pengendalian penyakit juga dilakukan pada penyakit Septicemia Epizootica (SE), jembrana dan rabies. Upaya pengendalian AI berjalan dengan baik terutama adanya dukungan petugas PDSR (*Participatory Diseases and Surveillance Responses*) atau tim gerak cepat dalam merespon, mendeteksi dan melaporkan kasus penyakit di wilayahnya melalui Sistem SMS gateway.

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 didasarkan pada realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada tahun 2017 memperoleh anggaran belanja langsung sebesar Rp 72.713.100.731,-. Anggaran ini mengalami penurunan pada perubahan anggaran menjadi Rp 51.098.628.129,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp 33.489.089.881,- atau sebesar 65,54 %. dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017

No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
A	UTAMA	46.529.554.762	29.186.789.985	62,73
1	Peningkatan Kesejahteraan Petani	927.933.800	685.309.343	73,85
2	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	7.021.614.842	6.588.019.991	93,82
3	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	37.168.196.620	20.667.657.277	55,61
4	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1.411.809.500	1.245.803.374	88,24
B	PENUNJANG	4.569.073.367	4.302.299.896	94,16
TOTAL (A+B)		51.098.628.129	33.489.089.881	65,54

Dari anggaran yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat bahwa program yang paling besar anggarannya adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan sebesar Rp 37.168.196.620,- dengan serapan anggaran 55.61%. Untuk serapan anggaran terbesar adalah Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan anggaran Rp 7.021.614.842,- dan serapan 93.82%. Sementara serapan anggaran paling kecil pada Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	TARGET			REALISASI		
			(Rp 000)	FISIK (%)	KEU (Rp 000)	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (Rp)	KEU (%)
I	Pemenuhan Pangan Asal Ternak Dan Agribisnis Peternakan Rakyat								
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		1.360.000	100	1.360.000	100	95,00	1.188.445,7	87,39
a	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas	90.000 Stek	1.080.000	100	1.080.000	100	88,89	933.062	86,39
b	Penguatan Pakan Tambahan Untuk Ternak Gangguan Reproduksi	40 Ton	280.000	100	280.000	100	100,00	255.383,7	91,21
2	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	40.000 Dosis	1.324.800	100	1.324.800	100	96,82	1.158.789,1	87,47
3	Penyediaan Benih Dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		8.420.054	100	8.420.054	100	55,74	7.354.799,6	87,35
a	Pengembangan Populasi Sapi Potong (Kelompok)	3 Kelompok	885.000	100	885.000	100	-	8.700,3	0,98
b	Optimalisasi Reproduksi	56.208 Ekor	7.535.054	100	7.535.054	100	111,47	7.346.099,3	97,49
4	Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif	3 Lokasi	1.981.023	100	1.981.023	100	100,00	1.685.023	85,06
5	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	1 Layanan	100.000	100	100.000	100	100,00	98.202	98,20
Jumlah			13.185.877	100	13.185.877	100	89,51	11.485.259,8	89,09

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2017 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2014-2019, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam merealisasikan capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan kegiatan dengan realisasi Fisik adalah sebesar 96,02%. Sementara itu, untuk realisasi keuangan adalah sebesar 86,50%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dikategorikan dapat tercapai.

Hasil evaluasi telah menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membangun usaha tani ternak cukup besar dan hal ini telah didukung oleh tersedianya peluang potensi pembangunan peternakan yang cukup baik, serta potensi pemasaran yang strategis. Oleh karena itu diharapkan ke depan para pengambil keputusan hendaknya dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih baik lagi dalam pengalokasian sumber dana pembangunan Peternakan di Provinsi Riau.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2014 - 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengadaan ternak besar dan proses administrasi pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, terutama peningkatan pemahaman aparatur di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diinisiasikan secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan, sehingga pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat menjadi keniscayaan dimasa yang akan datang.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

